

## ***Collaborative Governance: Sebuah Tinjauan Literatur***

**Syafrian Tommy**<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

\*Email: [email@email.com](mailto:email@email.com)

### **Abstrak**

Pendekatan *collaborative governance* telah menjadi sebuah paradigma penting dalam pengambilan kebijakan publik, terutama dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika sosial, ekonomi dan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan literatur sistematis yang menggali konsep, metodologi, temuan, dan implikasi *collaborative governance* dalam konteks kebijakan publik, termasuk dalam proses pemecahan masalah publik. Melalui pencarian literatur yang terfokus pada database Scopus dengan kata kunci "*collaborative governance*," sebanyak 245 artikel terpilih untuk analisis. Artikel-artikel tersebut disusun secara kritis untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang mempengaruhi peran *collaborative governance* dalam kebijakan publik. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa *collaborative governance* dapat memperkuat partisipasi aktor-aktor terkait, meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperbaiki komunikasi, meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan kemampuan adaptasi dalam konteks kebijakan publik untuk mengatasi berbagai persoalan. Namun, tantangan-tantangan seperti kekurangan kepemimpinan yang efektif, kapasitas organisasi yang terbatas, perluasan kebijakan yang berbasis pada hasil, dan pembelajaran kolektif juga muncul dalam implementasi *collaborative governance*. Artikel ini memberikan arahan untuk *future research* yang lebih mendalam terkait *collaborative governance* dalam konteks kebijakan publik, dengan fokus pada pengembangan solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut.

**Kata kunci:** *collaborative governance, kebijakan publik, tinjauan literatur sistematis.*

## **PENDAHULUAN**

*Systematic Literature Review* (SLR) adalah pendekatan yang mendasar untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggabungkan penelitian yang relevan terkait dengan suatu topik, pertanyaan, atau isu tertentu (Kitchenham, 2004; Petersen et al., 2008; Rizal et al., 2018). Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan obyektif mengenai pengetahuan yang ada, mengungkapkan kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi, dan mengidentifikasi tantangan yang sedang dihadapi dalam konteks saat ini. Salah satu bidang yang mendapatkan perhatian signifikan dari peneliti dan praktisi adalah *collaborative governance*, suatu pendekatan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan tingkat dalam perancangan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan atau layanan publik (Eckerberg et al., 2015; Torfing & Ansell, 2017). *Collaborative governance* telah diakui sebagai metode yang efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang rumit dan melampaui kemampuan entitas organisasi atau sektor tunggal (Hamann, 2014).

Meskipun potensi manfaat *collaborative governance* dalam menangani isu-isu publik yang kompleks, pelaksanaannya juga dipenuhi oleh tantangan dan hambatan yang signifikan. Diantaranya adalah ketidakseimbangan kekuasaan, tujuan yang mungkin bertentangan, kesenjangan komunikasi, masalah kepercayaan, kendala lembaga, dan faktor-faktor kontekstual (Hermansson, 2019). Selain itu, diperlukan kejelasan konseptual dalam membedakan *collaborative governance* dari konsep terkait lainnya,



seperti tata kelola jaringan sosial yang melibatkan interaksi antar aktor dalam suatu jaringan yang saling tergantung (Provan & Kenis, 2008). Oleh karena itu, studi pemetaan literatur secara sistematis menjadi penting untuk memahami bagaimana *collaborative governance* dapat dikembangkan, difasilitasi, dan dievaluasi dalam konteks kebijakan publik, serta bagaimana dampaknya dapat meningkatkan keberhasilan penyelesaian masalah publik.

Memahami dengan baik tujuan SLR dan kerangka teoretis yang mendasarinya adalah langkah kunci sebelum menentukan kata kunci pencarian (Rizal et al., 2018; Yusuf et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, tujuan SLR adalah untuk membentuk pemahaman yang mendalam mengenai *collaborative governance* sebagai sebuah pendekatan untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang kompleks dan dinamis. Tujuan akhirnya adalah untuk menyajikan rekomendasi bagi penelitian masa depan dalam domain *collaborative governance*. Oleh karena itu, pemilihan kata kunci pencarian yang lebih spesifik dan relevan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dengan cermat tujuan dan kerangka teoritis yang mendukung. Langkah awal yang krusial adalah memahami konsep-konsep kunci yang terkait dengan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan kebijakan publik.

Artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *collaborative governance* sebagai pendekatan untuk mengatasi masalah kompleks dan dinamis dalam berbagai konteks, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Tujuan utama dari SLR ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian di masa depan yang lebih terfokus dalam domain *collaborative governance*. SLR harus dilakukan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang jelas untuk membimbing eksplorasi terhadap *state-of-the-art* dalam studi tata kelola kolaboratif. Pertanyaan penelitian yang relevan termasuk tren apa yang dapat diidentifikasi dalam penelitian *collaborative governance*, kerangka kerja utama yang digunakan untuk menganalisis *collaborative governance*, serta subjek area dan tema penelitian yang dominan dalam literatur terkait *collaborative governance*.

## METODE

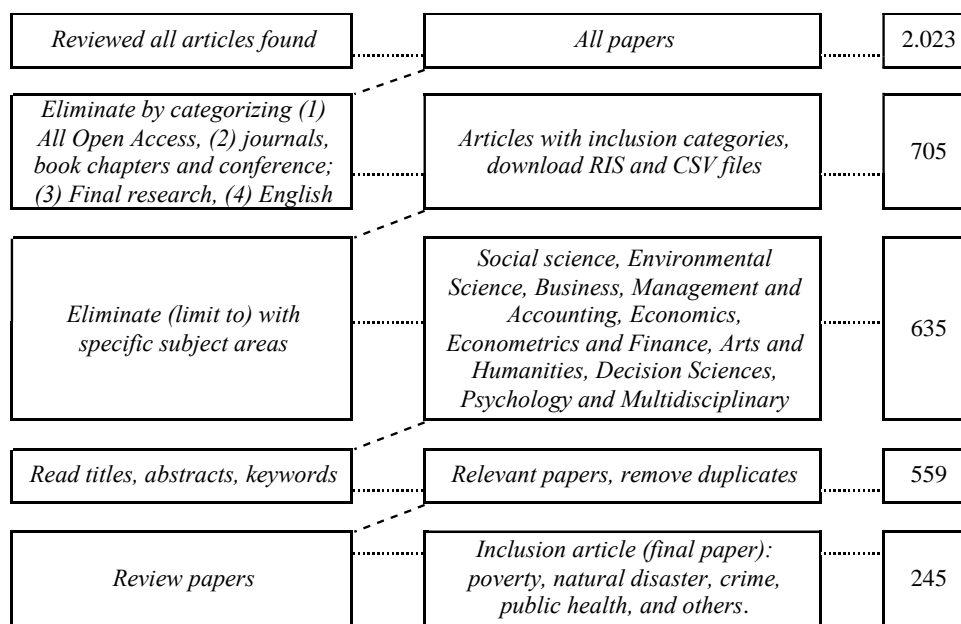
Metodologi yang digunakan dalam *Systematic Literature Review* (SLR) ini, kami mengikuti panduan yang telah dirumuskan dalam *Cochrane Handbook for Systematic Reviews* (Carrera-Rivera et al., 2022). Proses penelitian ini dibagi menjadi empat tahap utama. Tahap pertama melibatkan pembentukan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama kami. Selanjutnya, langkah kedua adalah menjalankan pencarian literatur yang relevan terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Tahap ketiga adalah proses seleksi ketat yang kami lakukan terhadap artikel dan literatur yang kami temukan selama pencarian. Langkah terakhir, yakni tahap keempat, mencakup ekstraksi dan sintesis data dari literatur yang memenuhi kriteria inklusi (Carrera-Rivera et al., 2022; Petersen et al., 2015).

Pada tahap awal penelitian ini, kami melakukan pencarian literatur dalam database yang relevan, dengan penekanan pada judul artikel, abstrak, kata kunci, dan sumber pencarian yang terdaftar dalam indeks Scopus. Hasil dari pencarian literatur terkait *collaborative governance* mencapai jumlah sebanyak 2.023 dokumen (waktu pencarian: April 2023). Dalam pencarian ini, kami menemukan bahwa literatur tentang *collaborative governance* telah muncul sejak tahun 1990 dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk mengetahui fokus riset yang

sesuai dengan tujuan pencarian, maka penulis melakukan limitasi menjadi lebih khusus dan fokus dengan string pencarian sebagai berikut:

*TITLE-ABS-KEY ("collaborativegovernance") AND (LIMIT-TO (PUBSTAGE,"final")) AND (LIMIT-TO (OA,"all")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,"ar")) OR LIMIT-TO (DOCTYPE,"ch") OR LIMIT-TO (DOCTYPE,"cp")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE,"English")) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA,"SOCI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA,"ENVI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA,"BUSI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA,"ECON") OR LIMIT-TO (SUBJAREA,"ARTS") OR LIMIT-TO (SUBJAREA,"DECI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA,"PSYC") OR LIMIT-TO (SUBJAREA,"MULT"))*

Setelah melakukan penyaringan yang ketat, kami berhasil mengidentifikasi 245 dokumen yang memenuhi kriteria inklusi kami. Limitasi dokumen inklusi berdasarkan karakteristik berikut: (1) *Document type* menjadi *article, book chapter, review, conference paper, book*, (2) *Language* menjadi hanya *English*, (3) *Source type* menjadi *journal, book, book series, conference peocceeding*. Artikel akhir yang kami pilih adalah artikel-artikel yang secara khusus berfokus pada topik yang relevan dan memenuhi standar tertentu untuk dimasukkan dalam ensiklopedia atau basis data sumber daya SLR. Proses SLR dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. SLR process (compilation of relevant articles)

Selanjutnya, metode analisis SLR digunakan untuk menyusun tinjauan literatur yang sistematis dari 245 artikel yang telah ditemukan, dengan tujuan menghasilkan hasil yang lebih objektif dan valid. Dalam SLR ini, kami memanfaatkan perangkat lunak seperti *Microsoft Excel, JabRef, Mendeley*, dan *VOS Viewer* untuk menggambarkan secara visual hubungan antara artikel, kata kunci, dan penulis. Perangkat lunak ini membantu dalam menghasilkan hasil SLR yang lebih akurat. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan perangkat lunak harus tetap dilakukan dengan hati-hati dan

tidak boleh menggantikan peran manusia dalam proses seleksi dan penilaian artikel secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berfokus pada sintesis data, yang melibatkan perangkuman, analisis, dan integrasi data dari berbagai studi yang disertakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sintesis data menggunakan metode naratif dan kuantitatif. Sintesis naratif menggambarkan temuan-temuan utama dan tema-tema di seluruh studi dengan menggunakan tabel, grafik, dan teks. Pada Tabel 1, hasil pemetaan berdasarkan fokus penelitian diperoleh 15 kategori, yaitu *poverty* (2.9%), *destitution* (5.7%), *natural disasters* (0.8%), *social crime* (1.2%), *public health* (3.3%), *health problems* (18%), *water problems* (5.7%), *air pollution* (1.6%), *sustainability* (6%), *land issues* (4.9%), *sustainability* (11.4%), *environmental conflict* (9.4%), *migrant, urban & humanitarian* (6.1%), *malnutrition & stunting* (0.8%), *flooding issues* (0.8%), dan masalah lainnya, yang dapat diatasi dengan *collaborative governance*.

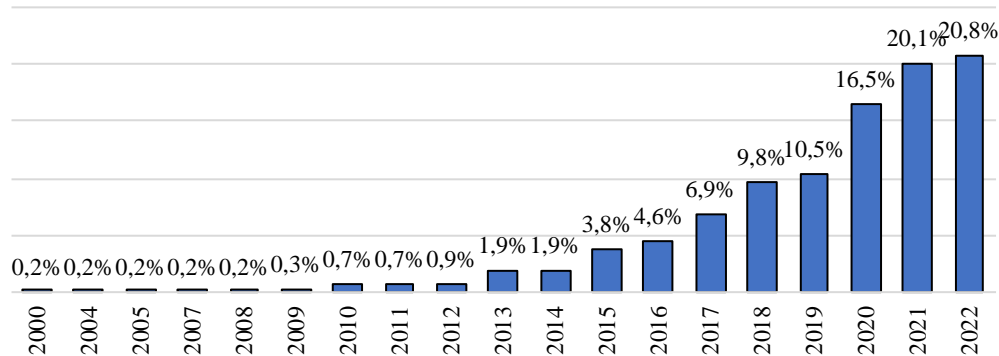
Tabel 1. *Results of systematic mapping based on research focus*

| No | Research focus    | Authors   | Articles |
|----|-------------------|---|----------|
| 1  | Poverty           | Fitriana et al. (2019); Zhang et al. (2020); Meads (2017); Florini & Pauli (2018); Xiang & Tan (2019); Tian & Ge (2022); Galli et al. (2018)  | 7        |
| 2  | Poorness          | Yang et al. (2022); Feberina et al. (2021); Xu & Wei (2020); Vij (2011); Liu (2021); Tremblay et al. (2021); Liu et al. (2021); Ming'ate et al. (2014); Elias et al. (2020); Lyver et al. (2014); Marks & Miller (2022); Yuan et al. (2022); Angelstam et al. (2017); Rong & Shen (2022)  | 14       |
| 3  | Natural disasters | Bodin & Nohrstedt (2016); Jacobi et al. (2013)  | 2        |
| 4  | Societal crime    | Waardenburg et al. (2020); Waardenburg et al. (2020); van Erp (2017)  | 3        |
| 5  | Public Health     | Lelieveldt (2023); Emerson (2018); Lee et al. (2019); Plochg et al. (2013); Zhangyanhui, & Genglei (2021); Haapasaari et al. (2019); Kim (2015); Cui et al. (2022)  | 8        |
| 6  | Health problems   | Grootjans et al. (2022); Hersey & Gordon (2021); Gordon et al. (2020); Sijing (2022); Choi (2020); Woldesenbet (2018); Ulibarri et al. (2020); Sitienei et al. (2021); Tremblay et al. (2019); Fu et al. (2021); Crompton et al. (2018); Vainieri et al. (2021); Cyr et al. (2021); Schneider et al. (2019); Robert et al. (2022); Tute et al. (2021); Buddharaksa et al. (2021); Chang et al. (2015); Ovseiko et al. (2014); Vabø et al. (2022); Chamberland-et al. (2022); Vidal et al. (2021); Woldesenbet (2021); Wu et al. (2020); Assmuth et al. (2020); Bartelings et al. (2017); Jeong & Kim (2021); Casprini & Palumbo (2022); Gonçalves et al. (2021); Jeanes et al. (2019); Kaushal et al. (2014); Yang et al. (2020); Sabbagh & Hickey (2020); Bretas et al. (2017); Kurtsal & Viaggi (2020); Prevo et al. (2020); Bárrrios et al. (2018); Onitsuka et al. (2018); Metz | 44       |



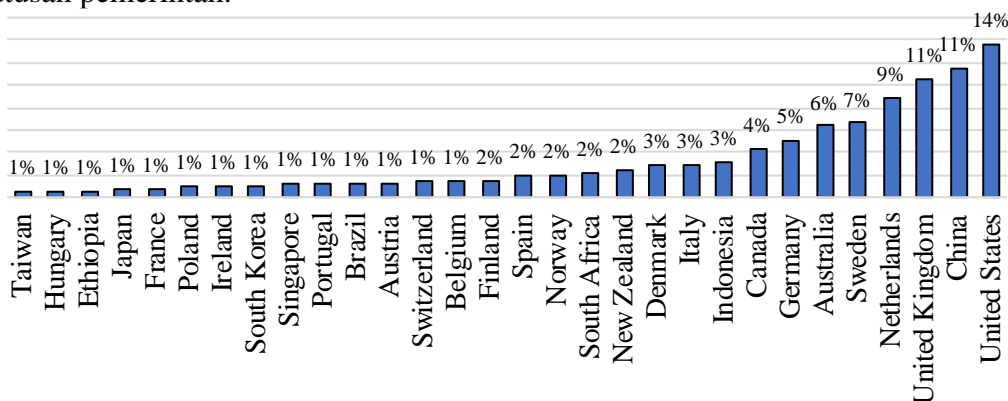
| No           | Research focus  | Authors   | Articles   |
|--------------|---|---|------------|
|              |   | & Ingold (2017); Adu-et al. (2021); Wijesinghe & Thorn J (2021); Looman et al. (2021); Mcet al. (2021); Shin et al. (2021)  |            |
| 7            | Water problems  | Lu et al. (2022); Huang et al. (2022); Yoder et al. (2021); Jones & White (2022); Woldesenbet (2020); Bitterman & Koliba (2020); Vodden (2015); Fish et al. (2010); Sánchez et al. (2022); Söderberg et al. (2021); Widmer et al. (2019); Agramont et al. (2022); Ferreira et al. (2018); Person et al. (2017)  | 14         |
| 8            | Air Pollution   | Guo et al. (2022); Wang et al. (2021); Zheng et al. (2021); Zheng (2023)  | 4          |
| 9            | Lands Problem   | Roengtam & Agustiyara (2022); De et al. (2019); Bruno (2020); Molenveld et al. (2021); Guerrero et al. (2015); Westerink et al. (2017); Chapman et al. (2010); Avoyan & Meijerink (2021); Midgley et al. (2021); Lee & Baggio (2021); Dressel et al. (2020); Angelstam et al. (2021)  | 12         |
| 0            | Sustainability  | Ding et al. (2022); Guo & Li (2022); Gollagher & Hartz-Karp (2013); Wang & Ran (2018); Ahdiyana et al. (2021); Zhao & Wang (2019); Prehoda et al. (2019); Sundqvist-Andberg & Åkerman (2022); Al et al. (2022); Baudoin & Gittins (2021); Hou & Yungang (2017); Eckerberg et al. (2015); De et al. (2017); Choi & Robertson (2019); Ain et al. (2021); Unceta et al. (2019); Kusumawardhani et al. (2022); Zhao et al. (2022); Brink & Wamsler (2018); Yang et al. (2021); Cusack et al. (2022); Sun et al. (2022); Rahmayanti (2021); Af et al. (2020); Kwiatkowski et al. (2020); Pereira et al. (2017); Vangen et al. (2015); Swann (2019) | 28         |
| 1            | Environmental conflicts   | Duan et al. (2020); Wang & Gong (2022); Fan et al. (2022); He et al. (2021); Cheng et al. (2015); Titik (2018); Cheung & T (2015); Fajrina et al. (2023); Arantes et al. (2020); Brisbois et al. (2019); Ulibarri (2019); Vihma & Toikka (2021); Merritt & Kelley (2022); Woolaston (2018); Zhang & Zhu (2022); Inguaggiato et al. (2021); Rapp (2020); Sant'et al. (2019); Newig et al. (2018); Scott (2015); Fliervoet et al. (2016); Howlett (2014); Vuori et al. (2019)   | 23         |
| 2            | Migrant, urban & humanity   | Dupuy & Defacqz (2022); Erikson & Larsson (2022); Bahri et al. (2020); Liu & Xu (2018); Dapilah et al. (2021); Bradley et al. (2022); Griggs et al. (2020); Newman et al. (2004); Sutter (2020); Temmerman et al. (2021); Bradley (2012); Ansell & Torfing (2021); Zhang & Tian (2022); Huang & Y (2020); Hong & Ryu (2019)   | 15         |
| 3            | Mal-nutrition & stunting  | Carboni et al. (2017); Candarmaweni, et al. (2020)  | 2          |
| 4            | Flood problem   | Aung & Lim (2021); Lindbergh et al. (2022)  | 2          |
| 5            | Other problems, which can be overcome with collaborative governance |   | 67         |
| <b>Total</b> |   |   | <b>245</b> |

Fokus penelitian tentang poverty, poorness, public health, migrasi atau urbanisasi, sanitasi yang rendah dan fasilitas publik yang tidak memadai menjadi salah satu faktor terhambatnya program pembangunan. Akan tetapi, secara khusus, fokus penelitian pada kategori kebijakan publik atau persoalan publik dalam SLR *collaborative governance* disebutkan secara eksplisit. Fokus penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengembangan daerah, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk dipahami. Upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial, rendahnya kesejahteraan dan lambatnya pembangunan daerah, harus dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak, seperti aktor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan pendekatan *collaborative governance*. Hal ini memungkinkan terciptanya solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut.



Gambar 2. Collaborative Governance Research Trends 2000-2022

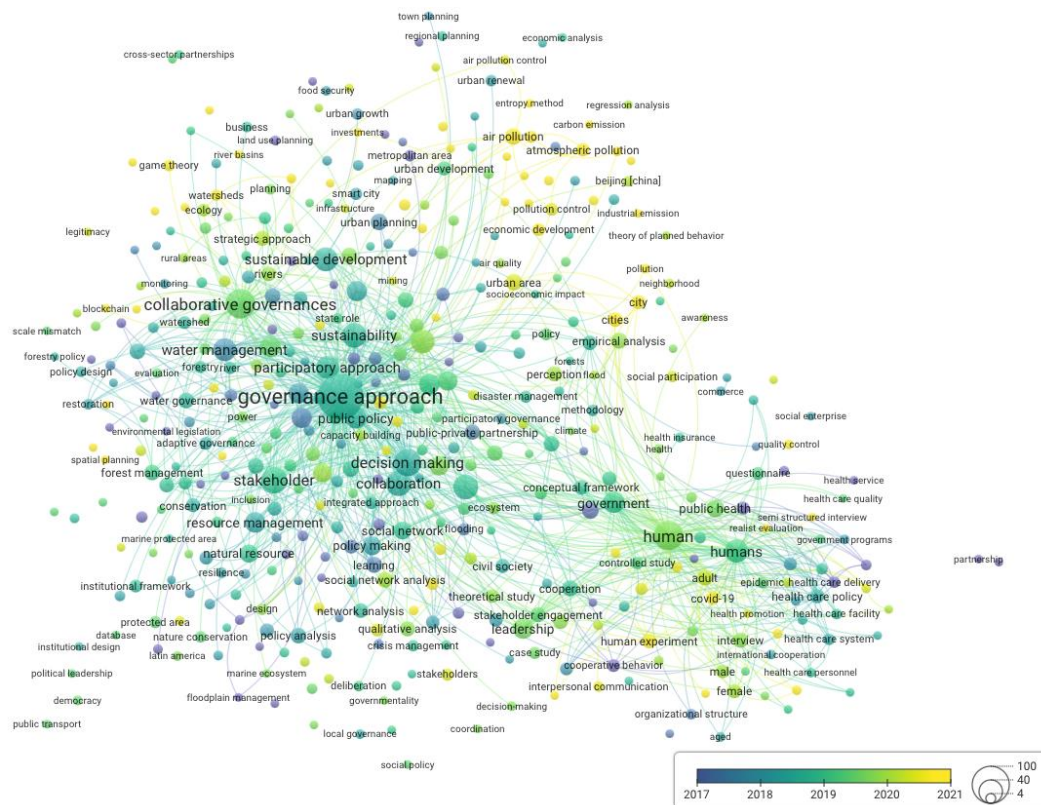
Tren studi tentang collaborative governance yang dimulai dari tahun 2000 hingga 2022. Hasil publikasi collaborative governance mulai meningkat signifikan pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga pada tahun 2022. Penelitian mengenai *collaborative governance* dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika organisasi dan gerakan sosial secara aktif menuntut partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan (Aaltonen & Turkulainen, 2022; McKelvey et al., 2021). Perdebatan mengenai *collaborative governance* dimulai dan berkembang pada tahun 1990-an hingga saat ini. Pada tahun 1960-an, pemerintah Amerika Serikat mulai mempromosikan model partisipasi publik untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat legitimasi keputusan pemerintah.



Gambar 3. Countries of Origin of Publications

Di era globalisasi, *collaborative governance* kolaboratif menjadi sangat penting untuk memperkuat kebijakan yang adil dan inklusif dalam merespons tantangan global

seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan kekeringan. Oleh karena itu, teori *collaborative governance* terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai praktik pemerintahan, antara lain terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat (Hickey et al., 2023; Rapp, 2020), dan pengelolaan sistem sosial masyarakat yang inklusif (Ahdiyana et al., 2021). Berdasarkan asal negara peneliti, diketahui bahwa penelitian *collaborative governance* secara umum didominasi oleh publikasi ilmiah yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu sebanyak 14%, China dan Inggris masing-masing sebanyak 11% dengan perbandingan sebaran artikel di seluruh dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai *collaborative governance* merupakan tema penelitian yang banyak mendapat perhatian dari para akademisi dan praktisi di Amerika Serikat, China dan Inggris.



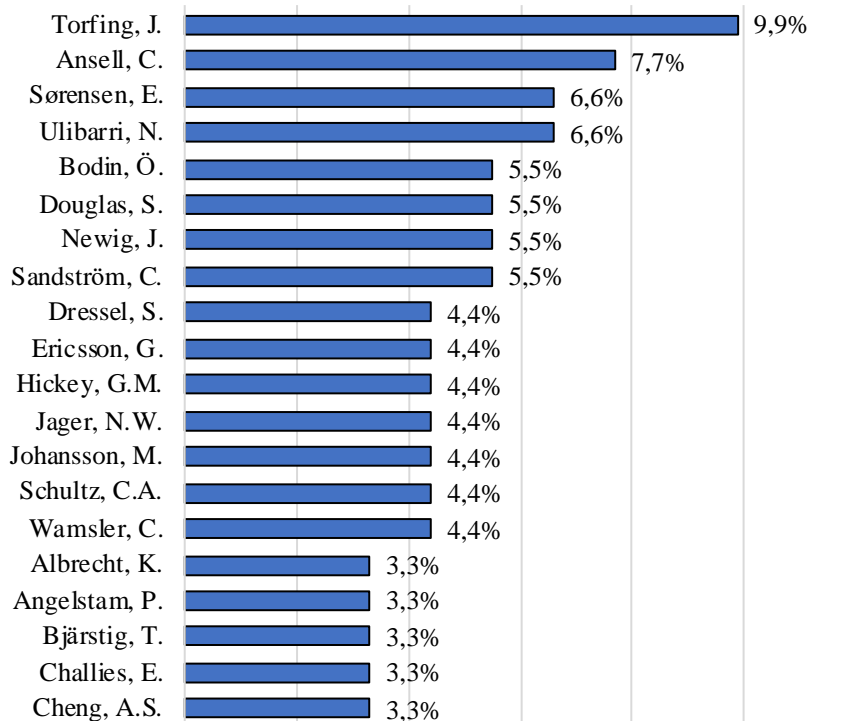
Gambar 4. VOS Viewer (*Research Focus*)

Hasil sintesis SLR yang berfokus pada banyak topik penelitian harus diinterpretasikan secara lebih holistik dengan analisis VOS Viewer. Variabel-variabel dalam VOS Viewer dapat dihubungkan dengan *co-occurrence*. Untuk membangun *framework* penelitian, *file database bibliografi* (misalnya, *file Web of Science* atau *Scopus*) dapat digunakan sebagai masukan ke VOS Viewer. Dengan VOS Viewer, pengguna dapat menganalisis *bibliometric networks*, termasuk *co-occurrence* dan hubungan antara authors, subjek, atau institusi penelitian. Dari hasil VOS Viewer, ditemukan korelasi penelitian di bidang "*Governance Approach*" dengan topik-topik lain seperti (1) *Sustainability*, (2) *Humanity*, (3) *stakeholder*, (4) *decision making*, (5) *public health*, (6) *cooperation*, (7) *leadership*, (8) *urban planning*, (9) *resources management*, (10) *policy making*, (11) *forest management*, (12) *participatory approach*, (13) *health care system*, (14) *conservation*,

(15) *civil society*, (16) *natural resources*, (17) *ecosystem*, (18) *resilience*, (19) *smart city*, dan (20) *infrastructure*.

Analisis selanjutnya adalah mengevaluasi *overlay of co-occurrences* berdasarkan tren penelitian *collaborative governance* yang saat ini sedang diteliti, termasuk (1) *urban areas*, (2) *rural/coastal areas*, (3) *societal linking*, (4) *bridging organizations*, (5) *citizen engagement*, (6) *biodiversity conservation*, (7) *ecology*, (8) *restoration*, (9) *air pollution*, (10) *economic development*, (11) *cities*, (12) *industrial emissions*, (13) *social participation*, (14) *watersheds*, (15) *social network analysis*, (16) *human experiment*, (17) *interpersonal communication*, (18) *cooperative behavior*, (19) *spatial planning*, (20) *cross-sector partnerships*. Dalam penelitian ini, merupakan fakta empiris bahwa dalam proses *collaborative governance*, terdapat keterkaitan dengan topik-topik penelitian baru yaitu keterlibatan warga, menjembatani organisasi, dan menghubungkan masyarakat.

Analisis ini mengindikasikan bahwa *collaborative governance* telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan penelitian-penelitian yang semakin mengintegrasikan aspek-aspek baru, seperti peran aktif masyarakat, organisasi pendukung, dan penghubung antara berbagai pihak terkait. Hal ini mencerminkan respons terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks, serta tuntutan akan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Selain itu, adanya keterkaitan dengan topik-topik lain seperti *land use planning*, *land conservation*, dan *food security* menunjukkan bahwa *collaborative governance* memiliki dampak yang luas dan mencakup berbagai sektor, termasuk pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan ketahanan pangan. Hal ini menunjukkan potensi untuk kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif dalam mengatasi isu-isu terkait lingkungan dan sosial.



Gambar 5. Authors who have the highest publications (top 20)





Sintesis SLR selanjutnya adalah tinjauan terhadap penulis atau pengarang yang paling sering melakukan penelitian dan mempublikasikannya. Berdasarkan hasil SLR terhadap penulis, penulis menemukan bahwa Torfing, J., Ansell, C., Sørensen, E., Ulibarri, N., dan Bodin, Ö. merupakan penulis yang paling banyak melakukan penelitian tentang *collaborative governance* di Scopus. Torfing Jacob adalah seorang profesor ilmu politik di Universitas Roskilde di Denmark. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah *the book Collaborative Governance: New Ideas for Democratic Governance in the 21st Century* (Torfing et al., 2021; Torfing & Ansell, 2017). Kemudian Christopher Ansell (Ansell, 2019; Ansell & Gash, 2018) sebagai penulis tertinggi kedua yang menerbitkan karya tulisnya yang berjudul *Collaborative Governance in Theory and Practice* yang ditulis Bersama Alison Gash.

Dalam sintesis SLR berikutnya adalah tinjauan terhadap kutipan atau sitasi artikel. Penulis dengan sitasi terbanyak adalah penulis yang karyanya dikutip atau dirujuk oleh penulis lain dalam artikel atau karya ilmiah mereka. Banyaknya sitasi menunjukkan bahwa karya penulis tersebut dianggap penting atau berpengaruh di bidangnya. penulis yang paling banyak dikutip adalah Ansell & Gash (2008) dengan sitasi sebanyak 2.954 (*Scopus data*). Di posisi kedua adalah Emerson K., Nabatchi T., and Balogh S. (2012), dengan judul artikel *an integrative framework for collaborative governance* yang dipublikasi oleh *the Journal of Public Administration Research and Theory* (Emerson et al., 2012) dengan sitasi sebanyak 1,325.

Ansell dan Gash mengusulkan *framework collaborative governance* sebagai berikut: (1) *initial conditions*; (2) *institutional design*; (3) *leadership*; and (4) *collaborative processes*. Sementara itu, Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, dalam jurnalnya yang berjudul *an integrative framework for collaborative governance* menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari (1) *collaboration dynamics*, (2) *collaboration actions*, dan (3) *impact and adaptation on the collaboration process* (Emerson et al., 2012). Pandangan dan kerangka kerja yang digagas dan diusulkan oleh Ansell & Gash (2008) dan Emerson et al. (2012) akan menjadi *applied theory* dalam berbagai riset tentang *collaborative governance*.

## KESIMPULAN

Sintesis SLR ini menyoroti pertumbuhan dan perluasan yang signifikan dalam penelitian *collaborative governance* dalam berbagai konteks, khususnya dalam mengatasi masalah-masalah sosial, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Meskipun *collaborative governance* telah menerima perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir, ada kebutuhan untuk lebih menekankan penelitian terkait kebijakan publik dalam kerangka *collaborative governance*. Pemecahan masalah publik adalah area penting yang memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, pengembangan model tata kelola kolaboratif yang efektif untuk menangani masalah ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya.

Tren penelitian *collaborative governance* menunjukkan peningkatan yang konsisten sejak tahun 2015, dengan Amerika Serikat, China, dan Inggris sebagai kontributor utama. Hal ini mencerminkan relevansi dan perubahan kompleks dalam lingkungan sosial dan kebijakan global. Penelitian ini juga mengidentifikasi keterkaitan yang kuat dengan topik penelitian lainnya seperti kebijakan kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan manajemen sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat, peran menjembatani organisasi, dan kemampuan menghubungkan berbagai pihak menjadi komponen penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola kolaboratif.



Para peneliti yang paling produktif dalam *collaborative governance* adalah Jacob Torfing, Christopher Ansell, Eva Sørensen, Nicola Ulibarri, dan Örjan Bodin. Karya-karya mereka telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemahaman tentang *collaborative governance*. Selain itu, kutipan yang paling banyak merujuk pada karya Ansell dan Emerson sebagai landasan teoretis utama dalam banyak penelitian. Secara keseluruhan, *collaborative governance* merupakan bidang penelitian yang penting dan berkembang, dengan potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah-masalah kompleks di berbagai konteks global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aaltonen, K., & Turkulainen, V. (2022). Institutionalization of a collaborative governance model to deliver large, inter-organizational projects. *International Journal of Operations and Production Management*, 42(8), 1294–1328.
- Ahdiyana, M., Andari, S., Listyawati, A., & Mardiyati, A. (2021). Collaborative Governance in Realizing An Inclusive Workforce for People with Disabilities to Achieve Sustainable Development Goal's. In S. A., bin I. H., N. N., V. E., C. P., L. Y., Mukminan, & G. S.R. (Eds.), *2nd International Conference on Hazard Mitigation in Geographic and Education Perspectives, ICHMGEP 2020* (Vol. 884, Issue 1). IOP Publishing Ltd.
- Ansell, C. (2019). Collaboration: key concepts. In *Collaboration in Public Service Delivery: Promise and Pitfalls* (pp. 20–38). Edward Elgar Publishing Ltd.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.
- Bergsten, A., Jiren, T. S., Leventon, J., Dorresteijn, I., Schultner, J., & Fischer, J. (2019). Identifying governance gaps among interlinked sustainability challenges. *Environmental Science and Policy*, 91, 27–38.
- Bodin, Ö., & Nohrstedt, D. (2016). Formation and performance of collaborative disaster management networks: Evidence from a Swedish wildfire response. *Global Environmental Change*, 41, 183–194.
- Bodin, Ö., Robins, G., McAllister, R. R. J., Guerrero, A. M., Crona, B., Tengö, M., & Lubell, M. (2016). Theorizing benefits and constraints in collaborative environmental governance: A transdisciplinary social-ecological network approach for empirical investigations. *Ecology and Society*, 21(1).
- Boyle, E., Watson, C., McGookin, C., Deane, A., de Bhailís, D., McElligott, C., O'Hara, S., Tuohy, B., Mullally, G., & Gallachóir, B. Ó. (2021). Reflecting on a collaborative approach to a regional sustainability transition: Dingle Peninsula 2030. *Reflective Practice*, 22(3), 415–429.
- Carrera-Rivera, A., Ochoa-Agurto, W., Larrinaga, F., & Lasa, G. (2022). How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research. *MethodsX*, 101895.
- Davis, L., & Davidson, K. (2018). Planning for natural hazard resilience: An assessment of contemporary australian disaster management policy and strategy. *Australasian Journal of Regional Studies*, The, 24(3), 258–283.
- Dwirahmadi, F., Rutherford, S., Phung, D., & Chu, C. (2019). Understanding the operational concept of a flood-resilient urban community in Jakarta, Indonesia, from the perspectives of disaster risk reduction, climate change adaptation and

- development agencies. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(20).
- Eckerberg, K., Bjärstig, T., & Zachrisson, A. (2015). Incentives for Collaborative Governance: Top-Down and Bottom-Up Initiatives in the Swedish Mountain Region. *Mountain Research and Development*, 35(3), 289–298.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Hamann, R. (2014). Partnerships are not forever: The limits of collaborative governance in diamond mining in Namaqualand. In *Governance for Justice and Environmental Sustainability: Lessons Across Natural Resource Sectors in sub-Saharan Africa* (pp. 263–278). Taylor and Francis.
- Hedlund, J., Nohrstedt, D., Morrison, T., Moore, M.-L., & Bodin, Ö. (2023). Challenges for environmental governance: policy issue interdependencies might not lead to collaboration. *Sustainability Science*, 18(1), 219–234.
- Hermansson, H. (2019). Disaster Response in Turkey: Conditions Promoting Cross-Sectoral Collaboration and Implications for Effectiveness. *Administration and Society*, 51(7), 1051–1078.
- Hickey, G. M., Roozee, E., Voogd, R., de Vries, J. R., Sohns, A., Kim, D., & Temby, O. (2023). On the architecture of collaboration in inter-organizational natural resource management networks. *Journal of Environmental Management*, 328.
- Hossen, M. A., Benson, D., Hossain, S. Z., Sultana, Z., & Rahman, M. M. (2021). Gendered perspectives on climate change adaptation: A quest for social sustainability in badlagaree village, bangladesh. *Water (Switzerland)*, 13(14).
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. *Keele, UK, Keele University*, 33(2004), 1–26.
- Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering - A systematic literature review. In *Information and Software Technology* (Vol. 51, Issue 1, pp. 7–15).
- Mardiah, A. N. R., Lovett, J. C., & Evanty, N. (2017). Toward integrated and inclusive disaster risk reduction in Indonesia: Review of regulatory frameworks and institutional networks. *Disaster Risk Reduction in Indonesia: Progress, Challenges, and Issues*, 57–84.
- McKelvey, K. S., Block, W. M., Jain, T. B., Luce, C. H., Page-Dumroese, D. S., Richardson, B. A., Saab, V. A., Schoettle, A. W., Sieg, C. H., & Williams, D. R. (2021). Adapting Research, Management, and Governance to Confront Socioecological Uncertainties in Novel Ecosystems. *Frontiers in Forests and Global Change*, 4.
- Mulyadi, D., & Maulana, R. R. (2021). Government Collaboration Model for Disaster Management Policy in West Bandung Regency. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 100–103.
- Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. *EASE'08 Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, 68–77.
- Petersen, K., Vakkalanka, S., & Kuzniarz, L. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64, 1–18.



- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Rapp, C. (2020). Hypothesis and Theory: Collaborative Governance, Natural Resource Management, and the Trust Environment. *Frontiers in Communication*, 5.
- Rizal, M., Purnomo, M., Maulina, E., & Febrian, A. F. (2018). Electronic Road Pricing (ERP): A Systematic Mapping Study. *JBFEM*, 1(1), 91–108.
- Sørensen, E., Hendriks, C. M., Hertting, N., & Edelenbos, J. (2020). Political boundary spanning: politicians at the interface between collaborative governance and representative democracy. *Policy and Society*, 39(4), 530–569.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021a). Accountable government through collaborative governance? *Administrative Sciences*, 11(4).
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021b). Radical and disruptive answers to downstream problems in collaborative governance? *Public Management Review*, 23(11), 1590–1611.
- Torfing, J., & Ansell, C. (2017). Strengthening political leadership and policy innovation through the expansion of collaborative forms of governance. *Public Management Review*, 19(1), 37–54.
- Torfing, J., Ferlie, E., Jukić, T., & Ongaro, E. (2021). A theoretical framework for studying the co-creation of innovative solutions and public value. *Policy and Politics*, 49(2), 189–209.
- Ulibarri, N. (2015). Collaboration in federal hydropower licensing: Impacts on process, outputs, and outcomes. *Public Performance and Management Review*, 38(4), 578–606.
- Ulibarri, N. (2018). Does collaboration affect the duration of environmental permitting processes? *Journal of Environmental Planning and Management*, 61(4), 617–634.
- Ulibarri, N. (2019). Collaborative governance: A tool to manage scientific, administrative, and strategic uncertainties in environmental management? *Ecology and Society*, 24(2).
- Ulibarri, N., Cain, B. E., & Ajami, N. K. (2017). A framework for building efficient environmental permitting processes. *Sustainability (Switzerland)*, 9(2).
- Ulibarri, N., Emerson, K., Imperial, M. T., Jager, N. W., Newig, J., & Weber, E. (2020). How does collaborative governance evolve? Insights from a medium-n case comparison. *Policy and Society*, 39(4), 617–637.
- Ulibarri, N., & Scott, T. A. (2017). Linking network structure to collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(1), 163–181.
- Yusuf, Y., Heriyanto, M., Waluyo, T. J., Fadli, M., & Febrian, A. F. (2021). Social Capital: A Literature Review In Resources Management. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(5), 1164–1172.
- Zhang, Y., Kang, S., & Koo, J.-H. (2021). Perception difference and conflicts of stakeholders in the urban regeneration project: A case study of nanluoguxiang. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–16.